

KASUS COVID-19 MELONJAK

## Pemkot Bogor Kaji Tempat Kost Jadi Tempat Isolasi

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang menyiapkan tempat isolasi pasien Covid-19 berbasis masyarakat. Hal tersebut sebagai salah satu langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Sebagai antisipasi perintah dari Pak Wali Kota kami menyusun, membuat atau mencari tempat isolasi berbasis masyarakat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, dikutip dari kanal Youtube Pusdalops BNPB dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kemarin.

Syarifah mengatakan, ada beberapa opsi atau pilihan yang akan digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 berbasis masyarakat. Mulai dari aula hingga indekos di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

"Kami mencoba kekuatan sendiri tempat-tempat yang ada berbasis masyarakat. Jadi sudah mulai melihat tempat kost yang kosong, kemudian juga beberapa aula di desa, kelurahan dan sebagainya. Itu sebagai cadangan apabila kita tidak mendapat tempat (isolasi) lagi, jadi berbasis masyarakat," ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, Pemkot Bogor sedang mencari tempat Diklat milik Kementrian

untuk dijadikan tempat isolasi tambahan. Namun, mayoritas tempat itu sudah digunakan oleh kementerian terkait.

"Kemudian kami sedang mencoba untuk mencari pusat isolasi nonrumah sakit. Jadi ini kami sudah mendatangi tempat-tempat Diklat karena di Kota Bogor dan Kabupaten sebetulnya tempat Diklat dari beberapa Kementerian. Jadi kami sudah ke Kementerian BKN, Kementan dan sebagainya tapi rata-rata Diklat itu sudah digunakan untuk kegiatan Diklat di masing-masing kementerian," tutur Syarifah.

Karena itu, Pemkot Bogor mengalami kesulitan menyiapkan tempat isolasi tambahan nonrumah sakit guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Kami kesulitan untuk di Kota Bogor mencari tempat-tempat Diklat untuk pusat isolasi. Yang ada sekarang pun ada 100 bed itu kami gunakan milik BPKP di Ciawi itu sudah (hampir) full karena kapasitasnya sudah 73 persen. Kemudian kami antisipasi lagi mencari tempat isolasi yang lain namun terakhir kami komunikasi dengan IPB untuk menggunakan asrama IPB mudah-mudahan terlaksana," tuturnya. ● **gio**

OGAH TERAPKAN LOCKDOWN WILAYAH

## Ridwan Kamil Lebih Pilih Lockdown Tingkat RT/Desa

**BANDUNG (IM)** - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuat kebijakan lockdown wilayah atau bahkan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menanggulangi kasus virus corona (Covid-19) di Jawa Barat.

Langkah lockdown atau PSBB dinilai Ridwan Kamil tidak akan efektif apabila di sejumlah daerah lain juga tidak menerapkan kebijakan yang sama.

"Kewenangan itu (lockdown atau PSBB) ada di pemerintah pusat. Kalau hanya dilakukan di satu wilayah tapi wilayah lainnya tidak melakukan itu sama saja tidak efektif," ujar Ridwan Kamil pada Senin (28/6).

Lebih lanjut, Mantan Wali Kota Bandung itu hanya akan menerapkan kebijakan pemerintah pusat, yakni melakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang telah

berlaku sejak 22 Juni sampai dengan 5 Juli 2021 mendatang.

"Kalaupun mau ada lockdown itu lockdown-nya per RT atau per desa, jadi tidak berbasis kota atau kabupaten," ucapnya lebih lanjut.

Kasus aktif Covid-19 yang masih terus meningkat membuat Ridwan Kamil tak bosan-bosannya mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) saat keluar rumah.

Ridwan Kamil juga menduga bahwa varian Covid-19 (delta) saat ini sudah mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

"Virus ini dengan varian baru sudah hadir di berbagai tempat karena tingkat keburukannya itu cukup cepat dibanding sebelumnya," imbuhnya.

"Oleh karena itu saya titip prokes terus, karena enggak solusi lagi kecuali prokes untuk orang sehat," sambungnya. ● **pur**

## Klaster Penyebaran Covid 19 di Setda Kab. Bogor Bertambah

**CIBINONG (IM)** - Paska 18 orang pegawainya positif terpapar wabah virus corona (Covid 19), hari ini Setda Kabupaten Bogor melaksanakan Rapid tes antigen 400 orang pegawainya.

"Hari ini kami merapid test antigen 400 pegawai, sebelumnya ada 18 orang pegawai Setda Kabupaten Bogor terpapar wabah Covid 19," kata Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin kepada wartawan, Senin, (28/6).

Pria yang pernah menjabat sebagai Camat Cariu ini menerangkan masyarakat Bumi Tegar Beriman diminta waspada, karena penyebaran wabah Covid 19 sedang meningkat hingga tingkat bed occupancy red (BOR) di rumah sakit sekitar 80-90 persen.

"Masyarakat harus waspada dan ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) Covid 19, selain itu tetap melakukan lima sajayang terdiri dari lima aksi nyata yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan aktivitas olahraga, istirahat yang cukup dan memakan makanan yang bergizi seimbang," terangnya.

Untuk mencegah atau menekan angka penyebaran wabah Covid 19, jajarannya pun melaksanakan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi Covid 19.

"Kami sudah melaksanakan 75 persen WFH mulai hari ini, dibantu Kodim 0621 Kabupaten Bogor dan

Polres Bogor, ratusan hingga ribuan orang kami vaksinasi Covid 19 tiap harinya," tutur Burhanudin.

Kabag Rumah Tangga Setda Kabupaten Bogor, Endah Nurmayanti menjelaskan hasil rapid test antigen hari ini, ada 14 orang pegawai Setda Kabupaten Bogor yang dinyatakan reaktif Covid 19.

"14 orang pegawai Setda Kabupaten Bogor dinyatakan reaktif Covid 19, lalu ia kami PCR swab test dan isolasi mandiri. Kami melakukan isolasi mandiri karena mereka tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid)," jelas Endah.

Mantan Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini melanjutkan melihat besarnya pegawai yang terpapar, ada kemungkinan Setda Kabupaten Bogor di semi lockdown.

"Kebijakan semi lockdown itu ada di tangan Asisten Administrasi, itu tergantung banyaknya pegawai Setda Kabupaten Bogor yang terpapar atau positif Covid 19," lanjutnya.

Informasi yang dihimpun inilah, selain Setda, klaster perkantoran penyebaran wabah Covid 19 ini terjadi di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). ● **gio**

# 8 | Nusantara



## PEMBATASAN KAWASAN PERKANTORAN PEMKAB BOGOR

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) antre untuk melakukan tes usap antigen sebelum memasuki kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/6). Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan 75 persen pegawai Pemkab Bogor akan melakukan Work From Home (WFH), sementara 25 persen melakukan Work From Office (WFO), seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 di kawasan perkantoran Pemkab Bogor terhitung mulai Senin 28 Juni 2021 hingga tujuh hari kedepan.

## Pemkab Bogor Siapkan 10 TPU untuk Atasi Lonjakan Korban Covid-19

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin memerintahkan para Camat untuk mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan mengamankan TPU milik Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut.

**CIBINONG (IM)** - Pemkab Bogor menyiapkan 10 Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk pasien meninggal akibat Covid-19. TPU tersebut tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang meningkat dunia.

TPU tersebut di antaranya, TPU Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong, TPU Tajurha-

lang Kecamatan Tajurhalang, TPU Ciomas Kecamatan Ciomas, TPU Cicadas Kecamatan Gunungputri, TPU Cipejo Kecamatan Cileungsi, TPU Singasari Kecamatan Jonggol, TPU Jabon Mekar Kecamatan Parung, TPU Rancabungur Kecamatan Rancabungur, TPU Galuga Kecamatan Cibungbulang dan TPU Gorowong Kecamatan Parungpan-

jang.

Terkait hal ini, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan

Covid-19 Kabupaten Bogor yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin memerintahkan kepada para Camat untuk mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan mengamankan TPU milik Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut yang akan digunakan bagi penduduk yang meninggal akibat wabah Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

"Saya sudah perintahkan Camat di 10 wilayah tersebut, untuk mengantisipasi dan mengkomunikasikan jikalau adanya penolakan warga atas penggunaan TPU tersebut, yang akan digunakan bagi penduduk yang meninggal akibat wabah Covid 19," tegas Burhanudin kepada wartawan, Senin, (28/6).

Ia pun mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid 19, termasuk dalam melaksanakan kegiatan dalam memakamkan korban Covid 19.

"Prokes pemakaman kor-

ban Covid 19 harus disiplin pelaksanaannya, jangan sampai terjadi klaster pemakaman dalam penyebaran wabah virus korona (Covid 19)," sambung-

nya. Burhanudin menjelaskan Satgas Penanganan Covid 19 tingkat desa, kelurahan dan kecamatan juga diminta melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi dan unsur terkait lainnya.

"Lakukan koordinasi den-

gan instansi vertikal maupun horisontal, kita harus menjadi supertim dan bukannya superman," jelas Burhanudin.

Selain melakukan koordinasi, Mantan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini pun meminta semua jajaran melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, maupun melalui dirinya selaku ketua harian. ● **gio**

## RSUD Cibabat tak Terima Pasien Kecuali Emergency

**BANDUNG (IM)** - RSUD Cibabat saat ini sudah tidak bisa menampung pasien, baik pasien umum ataupun Covid-19. Namun, masih ada pengecualian bagi pasien yang memang membutuhkan penanganan darurat.

"Kita enggak menerima pasien termasuk yang Covid-19 sejak tadi malam. Karena kondisinya memang sudah penuh ambulans juga banyak yang balik lagi. Tapi kalau emergency karena sudah sesak, ya kita masukkan, itu sudah risiko. Kalau yang ringan disarankan untuk di rumah atau di rumah sakit lain," kata Dirut RSUD Cibabat, Sukwanto Gamalyono kepada wartawan, Senin (28/6).

Dirinya menyebutkan, penampungan pasien di RSUD milik Pemkot Cimahi tak tanya di-huni para pasien Covid-19, jumlah nakes yang menangi Covid-19 namun terkonfirmasi positif juga mengalami penambahan.

"Sekarang yang positif nakesnya jadi 88," ujarnya.

Sementara viral sebuah unggahan video berdurasi 29 detik yang

memperlihatkan Nakes di RSUD Cibabat, Kota Gimahi, tengah mendorong beberapa peti jenazah pasien Covid-19.

Dalam unggahannya pembuat video memberikan keterangan 'Minggu 26062021 RS Cibabat Beruka Semoga Sadar Masyarakat Kalau Sudah Begini'. Pihak yang merekam video melafalkan doa dan takbir yang kemudian diikuti oleh nakes yang tengah mendorong peti tersebut.

Jika menghitung jumlahnya, ada sekitar lima peti mati yang didorong oleh tujuh orang nakes mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap melalui sebuah lorong dengan posisi agak menurun.

Sukwanto Gamalyono membenarkan jika video yang beredar tersebut memang benar di RSUD Cibabat.

"Kalau dari pakaian dan yang lainnya itu ya memang di (RSUD) Cibabat. Memang begitu kondisinya sekarang. Yang pasti tanggal 26 Juni itu 5 orang meninggal. Nah itu (video) juga mungkin yang tanggal 26 kemarin," tegasnya. ● **pur**

## ASN Kota Bogor 100 Persen WFH

**BOGOR (IM)** - Pemkot Bogor mulai Selasa (29/6) ini menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh aparat sipil negara (ASN) di Kota Bogor. Kebijakan itu diberlakukan guna menekan laju penyebaran virus Covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali.

"Saya minta disiapkan konsep work from home 100 persen. Mulai besok (Selasa ini-red) sampai satu Minggu kedepan 100 persen ASN di kota Bogor," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto usai melantik 311 ASN, di jalan Regional Ring Road (R3), Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Senin (28/6).

Bima Arya secara khusus meminta Camat Bogor Timur yang baru, Rena Da Frina, untuk menyelesaikan proyek infrastruktur jalur R3. Saat ini, dari total 10 kilometer yang direncanakan, baru terselesaikan sekitar 7 kilometer.

Bima Arya mengaku sengaja memilih lokasi tersebut sebagai tempat pelantikan. Dengan alasan agar jalur R3 bisa menyentuh target penyelesaian jalur tersebut. Di mana nantinya jalur R3 akan terhubung dengan Jalan Raya Tajur.

Dia meminta semua struktur pemerintahan berkoordinasi. Mulai dari Camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

"Saya pilih lokasi ini untuk pelantikan, untuk menguat-

## Lagi, 42 ASN Kota Bogor Terpapar Covid-19

**BOGOR (IM)** - Jumlah aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang terpapar Covid-19 terus bertambah menjadi 42 orang. Oleh karena itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memberlakukan sistem work from home (WFH) 100 persen bagi para ASN.

Bima Arya mengatakan, penambahan ASN yang terpapar Covid-19 berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan beberapa dinas. Sebelumnya, jumlah ASN yang terpapar dilaporkan ada 27 orang, dan bertambah menjadi 42 pada Senin (28/6).

"Hari ini ada lagi laporan ASN yang positif Covid-19, ada 42 (orang) sekarang. Dari BUMD dan beberapa dinas, jadi semakin banyak. Saya umumkan Pemkot mengambil langkah WFH 100 persen mulai besok, sampai masuk lagi sambil melihat perkembangan kondisi yang ada," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Selasa (28/6).

Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan, ada beberapa pelayanan mendasar yang terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang masih melayani di lapangan. Seperti, pelayanan sampah, pelayanan darurat, dan pelayanan kesehatan yang tidak mungkin berhenti. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

Sementara itu, untuk ASN di dinas lainnya, Bima Arya menegaskan, WFH ini bukanlah ajang liburan.

Dia meminta para ASN yang bekerja dari rumah untuk tidak keluar dari rumah, kecuali ada hal mendesak dan harus disampaikan melalui laporan.

"Setiap dinas nanti menunjuk piket. Jadi ada piket yang terus memonitor koordinasi. Karena kita juga terus korodinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat," ucapnya.

Bima Arya menuturkan, langkah untuk menerapkan WFH 100 persen di lingkungan Pemkot Bogor untuk menghindari penularan Covid-19 yang lebih jauh terhadap para ASN. Apalagi, ASN merupakan garda terdepan yang melayani warga.

Kemudian, lanjut dia, den-

gan diberlakukannya WFH maka mobilitas di Kota Bogor bisa dikurangi. Sambil memberi contoh bagi kantor-kantor di Kota Bogor untuk bekerja dari rumah, dimulai dari langkah yang dilakukan Pemkot Bogor.

"Langkah ini untuk menghindari penularan di lingkungan ASN karena kita garda terdepan. Kalau ASN rontok, siapa yang melayani warga. Kita juga memberikan contoh mulai dari Pemkot Bogor untuk menahan diri di rumah saja," tuturnya.

"Saat ini grafik penambahan kasus Covid-19 di Kota Bogor semakin tajam. Angka kematian di atas 100 persen, hunian rumah sakit dan kapasitas tempat tidur juga semakin tinggi," katanya.

Sebelumnya, pada Senin (23/6), sebanyak 27 ASN di lingkungan Pemkot Bogor terpapar Covid-19. Oleh karena itu, sejak Selasa (24/6) hingga Senin (28/6), Balai Kota Bogor dan kantor pemerintahan akan ditutup selama sepekan. Namun, penutupan itu dilanjutkan lantaran ASN yang terpapar terus bertambah. ● **gio**



## PRODUKSI TEMBAKAU DI KABUPATEN SUMEDANG

Petani menjemur tembakau di Kampung Malaka, Desa Banyuresmi, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/6). Petani menyatakan harga tembakau di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan sekitar 50 persen atau Rp50 ribu per kilogram dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp100 ribu per kilogram.